

PENGARUH PERAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN IMPLIKASINYA PADA KINERJA PEMERINTAH

I Made Yoga Darmawiguna¹
Ni Putu Sri Harta Mimba²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: darmawiguna.dropbox@gmail.com/ +6281239024095

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan dapat mengoptimalkan penerapan *Good Governance* sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan kinerja pemerintah. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan bukti empiris pengaruh peran APIP terhadap penerapan *Good Governance* dan implikasi dari penerapan *Good Governance* pada kinerja pemerintah. Penelitian dilakukan pada SKPD Kota Denpasar dan sampel 50 SKPD diperoleh dengan metode *nonprobability sampling* dengan teknik sampel jenuh. Data dikumpulkan melalui kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu *Partial Least Square* (PLS). Hasil analisis data menunjukkan bahwa peran APIP berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Governance*. Peran APIP berpengaruh positif pada kinerja pemerintah. Penerapan *Good Governance* berpengaruh positif pada kinerja pemerintah. Peran APIP berpengaruh positif secara simultan terhadap penerapan *Good Governance* dan penerapan *Good Governance* pada kinerja pemerintah.

Kata kunci: Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), *Good Governance*, Kinerja Pemerintah

ABSTRACT

The effectiveness of the role of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) is expected to optimize the implementation of good governance so that the implications on improving government performance. The purpose of this study to provide empirical evidence of the influence of APIP role towards the implementation of good governance and the implications from the implementation good governance on government performance. The study was conducted at SKPD Denpasar City and samples were obtained by 50 SKPD with nonprobability sampling methods with saturated samples techniques. Data collected through questionnaires. Techniques of data analysis is Partial Least Square (PLS). The result finds that the role APIP positive effect on the implementation of good governance. The role APIP positive effect on government performance. Implementation of good governance positive effect on government performance. The role APIP positive effect simultaneous on the implementation of good governance and implementation of good governance on government performance.

Keywords: Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), *Good Governance*, Government Performance

PENDAHULUAN

Pemberian otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri tidak lepas dari tuntutan masyarakat akan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sebagai bentuk dari pemerintahan yang baik dan bersih serta berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk selalu tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan memberikan pelayanan yang baik secara transparan, akuntabel dan berkualitas, sehingga pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mensejahterakan masyarakat (Windiarto, 2015).

Reformasipada tahun 1998 menginginkan suatu perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah yang lebih transparan, berkeadilan, akuntabel, berkualitas serta berorientasi pada kemakmuran rakyat, maka dari itu tuntutan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu direalisasikan (Acintya, 2015). Sehingga dengan menerapkan *Good Governanced* dianggap mampu untuk memutus mata rantai perilaku menyimpang seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang banyak terjadi seperti pada era orde baru serta penyelenggaraan pemerintahan yang mampu memakmurkan rakyatnya (Rasul, 2009).

Untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) terdapat tiga aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu: pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan (Mardiasmo, 2004:208). Keberhasilan atas tata

kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah tidak lepas dari peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang menjadi unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (www.kemenkeu.go.id). Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih serta berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, peran fungsional APIP pun diperluas dengan diterbitkannya Peraturan MENPAN No.5 Tahun 2008, Peraturan MENPAN-RB No.19 Tahun 2009, dan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia, tentang perluasan tugas dan wewenang dari APIP yang semula sebagai auditor internal pemerintah diperluas menjadi konsultan manajemen untuk mengefisienkan penyelenggaraan pemerintah dan aparat pencegah serta pemberantasan korupsi di internal pemerintah (Novriansa dan Riyanto, 2016).

Penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip *Good Governances* serta didukung optimalisasi fungsi pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik dan penyediaan barang publik demi masyarakat yang makmur dan sejahtera (Mardiasmo, 2004:11).

Penelitian terkait reformasi sektor publik telah banyak dilakukan. Penelitian tersebut antara lain: Nofianti dan Suseno (2014) yang melakukan penelitian di Pemerintah Daerah Provinsi Riau tentang pengaruh profesionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah terhadap pelaksanaan *Good Governancedan* implikasi pelaksanaan *Good Governance* pada akuntabilitas kinerja pemerintah, dimana penelitian tersebut memberikan hasil bahwa profesionalisme APIP berpengaruh positif terhadap pelaksanaan *Good Governance* serta memberikan

implikasi yang positif pada kinerja pemerintah. Hasil serupa dikemukakan oleh Basuki (2016) tentang pengaruh peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kudus serta Yusniyar dkk. (2016) yang meneliti tentang penerapan pengendalian internal terhadap *Good Governance* dan dampaknya pada kualitas laporan keuangan di SKPA Pemerintah Aceh yang menghasilkan penerapan pengendalian internal dapat meningkatkan terciptanya prinsip-prinsip *Good Governance* dan secara simultan mempengaruhi juga kualitas laporan keuangan SKPA Pemerintah Aceh yang mencerminkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga hasil penelitian tersebut mengemukakan hasil penelitian yang sama yaitu peran auditor intern pemerintah yang efektif dalam melaksanakan fungsinya mampu menghasilkan penerapan *Good Governance* yang semakin baik di lingkungan pemerintah, sehingga mampu meningkatkan kinerja pemerintah itu sendiri. Permasalahan yang hadir dari hasil tersebut adalah apakah hasil penelitian tersebut dapat digeneralisir pada seluruh pemerintah? khususnya di pemerintah daerah yang ada di Indonesia, dimana setiap pemerintah daerah memiliki karakteristik daerah yang berbeda dan menjadikan kebijakan otonomi atas daerahnya masing-masing pun berbeda.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar, yang dimana Pemerintah Daerah Kota Denpasar dipilih karena Pemerintah Daerah Kota Denpasar dijadikan *pilot project* reformasi sektor publik. Tetapi Pemerintah Daerah Kota Denpasar yang dijadikan *pilot project*

percontohan reformasi sektor publik masih memiliki peringkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar tahun 2015 yang berada dalam kategori CC, dimana peringkat tersebut peringkat minimal dalam penilaian akuntabilitas kinerja, karena kategori peringkat atas akuntabilitas kinerja yang baik adalah diatas CC (B, BB, A) (www.menpan.go.id) serta berdasarkan publikasi pemeriksaan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tahun 2015 mengenai kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap standar pelayanan publik yang menjadi parameter kinerja pemerintah, menyatakan Pemerintah Daerah Kota Denpasar masih berada dalam zona kuning, yang mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kota Denpasar masih perlu memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.

Penelitian ini dilakukan untuk memprediksi dan mendapatkan bukti empiris apakah hadirnya APIP yang berperan sebagai auditor intern pemerintah di Kota Denpasar mampu meningkatkan penerapan *Good Governanced* dan nantinya berimplikasi terhadap peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkuat teori agensi yang terjadi di sektor publik khususnya pada pemerintah daerah bahwa *agent* yaitu pemerintah memiliki kontrak untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan beretika dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat yang bertindak sebagai *principal*, serta memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih luas mengenai peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai auditor intern pemerintah dalam membantu penerapan *Good Governance* pada instansi pemerintah daerah

dan peningkatan kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pengembangan dalam bidang akuntansi keperilakuan serta riset-riset selanjutnya dengan fenomena serupa yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis berupa alternatif solusi bagi Pemerintah Daerah Kota Denpasar dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan agar menjadi lebih efisien dan efektif serta berorientasi pada kinerja yang tercermin dari program dan kebijakan yang mensejahterakan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memaksimalkan kerjasama dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai auditor intern pemerintah yang independen.

Teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) menggambarkan hubungan keagenan (*agency relationship*) dengan pemilik entitas (*principal*) berupa pemberian wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik. Dalam hubungan ini terjadi perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal* dan adanya perbedaan informasi yang dimiliki serta tujuan dan pilihan risiko terkait usaha yang dilakukan antara *agent* dengan *principal* sehingga dapat menimbulkan konflik diantara keduanya (Aikins, 2012). Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pemisahan kekuasaan dan pengendalian (Aikins, 2012). Konflik akan terus meningkat karena *principal* tidak dapat mengawasi aktivitas *agent* sehari-hari untuk memastikan bahwa *agent* telah bekerja sesuai dengan keinginan dari *principal* sehingga berdampak pada timbulnya asimetri informasi (Latifah, 2010). Permasalahan dalam hubungan antara *principal* dan *agent* bersumber adanya

perbedaan tujuan dan pilihan risiko yang dihadapi seperti regulasi dan kepemimpinan (Eisenhardt, 1989).

Teori keagenan telah dipraktikkan pada sektor publik khususnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Timbulnya masalah keagenan berawal dari adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, seperti yang terjadi pada hubungan keagenan antara pemerintah daerah (eksekutif) dengan pemilihnya (*voters*). Kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara yang dipegang oleh warga negara menyebabkan tekanan kepada eksekutif menjadi semakin besar dalam penyediaan pelayanan publik yang maksimal, dimana masyarakat sebagai *principal* mempunyai kepentingan yaitu menikmati hasil dan manfaat dari proses penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintah yang tercermin dari kebijakan atas program yang mensejahterakan masyarakat.

Ketika eksekutif atau pemerintah membuat keputusan atas penggunaan dan pengalokasian sumber daya, maka mereka diharapkan memerhatikan kebutuhan atau preferensi prinsipal atau pemilihnya (Parwati, 2015). Selain itu penggunaan dan pertanggung jawaban atas pengelolaan sumber daya tersebut pun perlu melibatkan pihak yang mampu mengawasi dan memberikan masukan atas upaya penggunaan dan pertanggung jawabannya secara independen dan profesional. Penerapan *Good Governance* oleh pemerintah dan memaksimalkan efektivitas peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai auditor internal pemerintah menjadi mekanisme yang penting untuk pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintah yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat (*principal*).

Auditor internal pemerintah atau sekarang disebut dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan salah satu fungsi sebagai pengelola kegiatan pengendalian intern, sehingga secara normatif, harus mewujudkan prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam organisasi internal audit (Basuki, 2016). Perluasan Peran APIP selaku auditor intern pemerintah yang semula hanya sebagai pengawas manajemen puncak dan konsultan manajemen puncak ke kontrol manajemen, yaitu terlibat kegiatan pengendalian dari awal perencanaan hingga akhir proses (Van Peurse 2004). Fungsi audit internal terbaru memainkan peran penting dalam tata kelola entitas melalui perluasan peran sebagai penjamin mutu dan layanan konsultasi. Dukungan manajemen dengan sumber daya dan komitmen untuk melaksanakan rekomendasi audit internal sangat penting dalam mencapai efektifitas audit internal. Perluasan fungsi audit internal dari kegiatan tradisional yaitu terkait dengan laporan keuangan menjadi jaminan kepatuhan dan jaminan untuk menjaga aset dan layanan nilai tambah sebagai konsultan melalui perannya dalam pemantauan, evaluasi, manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola (Ebaid 2011). Peran auditor internal merupakan kunci terciptanya sistem pengendalian intern yang efektif. Sistem pengendalian intern menjadi elemen kunci dalam *Good Governance* (Jones, 2008). Auditor internal melalui kegiatan internal audit dapat menjamin terciptanya *Good Governance* (tata kelola entitas yang baik).

Stoker (1998) mendefinisikan *governance* sebagai istilah yang mengacu pada pengembangan gaya pemerintahan, dimana gaya tersebut mengikis batas-batas antara masyarakat dan sektor privat. *Governance* atau tata kelola

pemerintahan berfokus pada mekanisme untuk mengatur hak penggunaan sumber daya dengan efisien dan efektif serta pengaturan terhadap sanksi atas penyalahgunaan sumber daya tersebut. *Governance* lebih dari suatu alat manajerial dan juga lebih dari sekedar usaha untuk mencapai efisiensi dalam memberikan pelayanan publik, tapi *governance* merupakan suatu sistem dalam menjalankan manajemen pemerintahan yang mampu menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi dengan saling bekerja sama antara jaringan institusi pemerintahan dan atau sektor privat serta masyarakat. *Good Governance* merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta dimana kesepakatan tersebut mencakup pembentukan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan di antara mereka (Hasyim, 2014). Sehingga dibutuhkan sinergi interaksi yang konstruktif diantara domain-domain (*state, private sector and society*) (Sari, 2013).

Ukuran kinerja suatu organisasi sangat penting guna evaluasi dan perencanaan masa depan (Widiari, 2015). Kinerja dapat dilihat melalui hasil kinerja sebelumnya dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya di masa sekarang serta dengan periode yang akan datang dalam lingkup tertentu (Wentzel, 2002).

Fungsi internal auditor dalam organisasi adalah untuk mengawasi penerapan sistem pengawasan intern dan memberikan saran atas evaluasi kepada manajemen bila ditemukan kelemahan dan penyimpangan, baik yang terdapat pada sistem

tersebut maupun dalam penerapannya dalam organisasi. Penelitian Amaliah (2014) menunjukkan hasil bahwa peranan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *Good Government Governance*. Hasil yang sama juga dikemukakan oleh Nofianti dan Suseno (2014) serta Adelia (2015) dengan menemukan hasil bahwa profesionalisme aparat pengawas intern berpengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan *Good Governance*, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H₁: Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Governance*

Peran APIP melalui pemantauan dan kegiatan pengawasan sebagai penguatan terciptanya efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah diharapkan dapat memotivasi peningkatan kinerja pegawai serta organisasi. Berdasarkan penelitian Aikins (2011) menemukan bahwa kegiatan audit internal yang dilakukan oleh satuan auditor intern mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah dari sektor fiskal serta dapat mengefisienkan operasional organisasi, penelitian ini mencoba mengkaitkan peran auditor internal pemerintah atau APIP dengan kinerja instansi pemerintah yang dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H₂: Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah

Tercapainya kinerja organisasi bukan saja ditentukan oleh tingkat kompetensi karyawan tetapi dipengaruhi juga oleh faktor lain yaitu tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance*. Dengan kata lain *Good Governance* adalah proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan,

dan akuntabel oleh instansi pemerintahan. Mulyawan (2009) dan Acintya (2015) menyatakan bahwa penerapan *Good Governance* berpengaruh positif signifikan pada kinerja pemerintah, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H₃: Penerapan *Good Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah

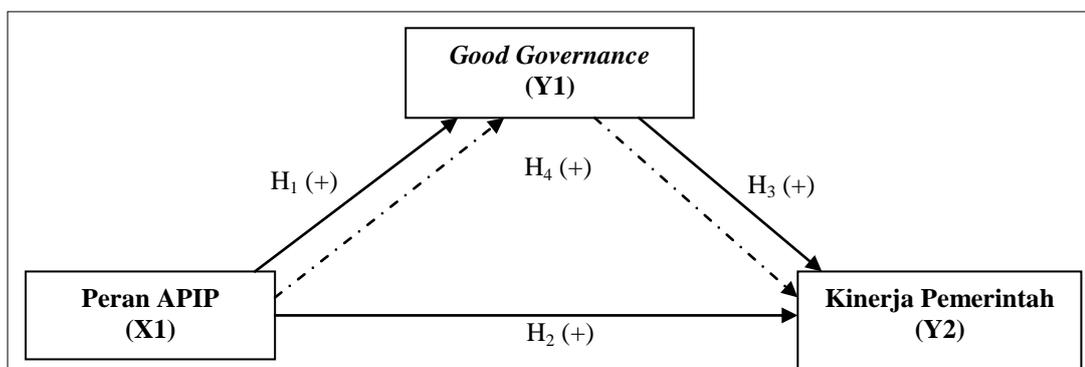
Kegiatan audit internal yang dilakukan di sektor publik telah menghasilkan nilai tambah bagi organisasi tersebut, seperti peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan manajemen risiko serta membantu dalam pencapaian tujuan organisasi yang mengindikasikan suatu kinerja yang meningkat (Mihret dan Woldeyohannis, 2008). Nofianti dan Suseno (2014) menyatakan bahwa peran hadirnya aparat pengawas intern yang profesional dilingkungan pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja unit kerja di pemerintah tersebut, tentu didukung dengan implementasi *Good Governance* yang optimal oleh masing-masing instansi pemerintah diharapkan semakin mampu untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah itu sendiri, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

H₄: Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah berpengaruh positif simultan terhadap penerapan *Good Governance* dan penerapan *Good Governance* terhadap kinerja pemerintah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pendekatan deskriptif digunakan dalam menganalisis peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan penerapan *Good Governance*. Sedangkan pendekatan asosiatif

adalah dalam rangka mencari tahu hubungan peran APIP terhadap *Good Governance* dan hubungan penerapan *Good Governance* pada kinerja pemerintah.



Gambar 1.
Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber: Data Diolah, 2016

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kota Denpasar yaitu pada SKPD Kota Denpasar. Objek dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas peran APIP, penerapan *Good Governance*, dan kinerja pemerintah Kota Denpasar.

Tabel 1.
Operasionalisasi Variabel Peran APIP

Variabel	Indikator	Kategori	Data
Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (X ₁)	a. Assurance activities b. Consulting activities c. Anti-corruption activities	Skala Likert: 1. Sangat Tidak Setuju (STS) 2. Tidak Setuju (TS) 3. Setuju (S) 4. Sangat Setuju (SS)	Interval (Skala Likert)

Sumber: Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (2013), Basuki (2016)

Tabel 2.
Operasionalisasi Variabel Penerapan *Good Governance*

Variabel	Indikator	Kategori	Data
Penerapan <i>Good Governance</i> (Y_1)	a. Partisipasi b. Taat hukum c. Transparansi d. Daya Tanggap e. Kesetaraan f. Efektivitas & efisiensi g. Akuntabilitas h. Visi stratejik i. Orientasi konsesus	Skala <i>Likert</i> : 1. Sangat Tidak Setuju (STS) 2. Tidak Setuju (TS) 3. Setuju (S) 4. Sangat Setuju (SS)	Interval (Skala <i>Likert</i>)

Sumber: Badruzaman dan Chairunnisa (2011)

Tabel 3.
Operasionalisasi Variabel Kinerja Pemerintah

Variabel	Indikator	Kategori	Data
Kinerja Pemerintah (X_2)	a. Pengelolaan APBD berdasarkan penerapan <i>value for money</i> b. Pengelolaan APBD secara adil dan merata c. Kesetaraan d. Memperjuangkan aspirasi e. Orientasi belanja kepada kepentingan public	Skala <i>Likert</i> : 1. Sangat Tidak Setuju (STS) 2. Tidak Setuju (TS) 3. Setuju (S) 4. Sangat Setuju (SS)	Interval (Skala <i>Likert</i>)

Sumber: Acintya (2015)

Populasi yang diteliti adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar periode 2015 yang berjumlah 50 SKPD. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dengan teknik sampel jenuh, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 50 SKPD. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner dengan memberikan kepada responden pada setiap SKPD.

Teknik analisis data diawali dengan mengevaluasi alat ukur yang digunakan dan didistribusikan dari variabel eksogen dan variabel endogen dengan melakukan uji validitas dan uji reabilitas instrumen penelitian. Selanjutnya dilakukan uji *non-*

response bias untuk menguji bahwa apabila terdapat kuesioner yang tidak lengkap dan atau tidak dikembalikan kepada peneliti, maka kuesioner yang tidak lengkap dan atau tidak kembali, tidak akan membuat simpulan terhadap penelitian menjadi bias. Kemudian untuk menguji hipotesis digunakan teknik analisis data yaitu *Partial Least Square (PLS)*.

Model persamaan struktural PLS terdiri dari model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*). Model pengukuran dengan indikator refleksif, validitas konsep dievaluasi dengan *convergent validity*, *discriminant validity*, *average variance extracted*, *composite reliability*. Model struktural diukur dengan menggunakan *R-square* variabel endogen, *Q-square predictive relevance* digunakan untuk mengukur model dan estimasi parameternya, pengujian hipotesis menggunakan nilai *t-statistic* dan koefisien jalur model penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuesioner yang disebar pada penelitian ini sebanyak 251 kuesioner yang didistribusikan pada 50 SKPD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Ringkasan distribusi pengiriman dan pengembalian kuesioner dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.
Ringkasan Distribusi Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner

Kuesioner	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang didistribusikan	251	100%
Kuesioner yang tidak kembali	103	41%
Kuesioner yang kembali	148	59%
Kuesioner yang digunakan	148	59%
<i>Respon Rate</i> $251/251 \times 100\% = 100\%$		
<i>Usable respon rate</i> $148/251 \times 100\% = 59\%$		

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Suatu instrumen dikatakan valid apabila nilai *r pearson correlation* terhadap skor total lebih besar dari 0,30 (Sugiyono, 2012:178). Variabel peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah, penerapan *Good Governance*, dan kinerja pemerintah memiliki nilai *r pearson correlation* secara berturut-turut dari 0,444 – 0,719 ($> 0,30$), dari 0,521 – 0,831 ($> 0,30$), dari 0,630 – 0,844 ($> 0,30$). Ketiga variabel tersebut memiliki nilai di atas 0,30 yang artinya pernyataan kuesioner dari ketiga variabel tersebut adalah valid. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60. Hasil uji reabilitas menunjukkan nilai *cronbach's alpha* untuk variabel peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah, penerapan *Good Governance*, dan kinerja pemerintah secara berturut-turut sebesar 0,859; 0,859; 0,930.

Pengujian *non-response bias* dilakukan untuk menguji bahwa apabila terdapat kuesioner yang tidak lengkap dan atau tidak dikembalikan kepada peneliti, maka kuesioner yang tidak lengkap dan atau tidak kembali, tidak akan membuat simpulan terhadap penelitian menjadi bias. Alat analisis yang digunakan *t-test*, jika *p-value* $> 0,05$ maka dapat dikatakan tidak terdapat perbedaan jawaban (respon) oleh responden yang tidak lengkap mengisi kuesioner atau tidak mengembalikan kuesioner dengan yang mengisi secara lengkap dan mengembalikan kuesioner. Hasil uji menunjukkan *p-value* untuk variabel peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah, penerapan *Good Governance*, dan kinerja pemerintah secara berturut-turut sebesar 0,118; 0,151; 0,332.

Uji *Partial Least Square* (PLS) dalam penelitian ini menggunakan *outer model* dengan indikator reflektif dan evaluasi *inner model* dengan tingkat signifikansi 5%.

Uji *convergent validity* dilakukan untuk mengetahui validitas dari indikator yang digunakan. Indikator dinyatakan valid dengan nilai *loading* berkisar di atas 0,50 (Ghozali, 2014:39). Hasil uji *convergent validity* masing-masing dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5.
Uji Convergent Validity

	Peran APIP	Penerapan <i>Good Governance</i>	Kinerja Pemerintah	Keterangan
X1.1	0,736393			valid
X1.4	0,797807			valid
X1.5	0,574788			valid
X1.7	0,885597			valid
X1.8	0,871464			valid
X1.9	0,858259			valid
X1.10	0,779871			valid
X1.11	0,754106			valid
X1.12	0,836806			valid
X1.13	0,762400			valid
Y1.1		0,709781		valid
Y1.3		0,701526		valid
Y1.4		0,852735		valid
Y1.5		0,799374		valid
Y1.7		0,867457		valid
Y1.8		0,690514		valid
Y1.10		0,783985		valid
Y2.1			0,782379	valid
Y2.2			0,885950	valid
Y2.3			0,781061	valid
Y2.4			0,835929	valid
Y2.5			0,886931	valid
Y2.6			0,835730	valid
Y2.7			0,830108	valid
Y2.8			0,761281	valid
Y2.9			0,781553	valid
Y2.10			0,785556	valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Discriminant validity dikatakan valid apabila nilai *cross loading* setiap indikator pada variabel yang bersangkutan memiliki nilai terbesar dengan *cross loading* variabel lainnya. Hasil uji *discriminant validity* masing-masing dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6.
Uji *Discriminant Validity*

	Peran APIP	Penerapan <i>Good Governance</i>	Kinerja Pemerintah	Keterangan
X1.1	0,736393	0,540250	0,678610	valid
X1.4	0,797807	0,678064	0,631320	valid
X1.5	0,574788	0,384315	0,442919	valid
X1.7	0,885597	0,721712	0,580363	valid
X1.8	0,871464	0,653101	0,488130	valid
X1.9	0,858259	0,656960	0,445459	valid
X1.10	0,779871	0,635868	0,433837	valid
X1.11	0,754106	0,633354	0,714314	valid
X1.12	0,836806	0,678845	0,589223	valid
X1.13	0,762400	0,744309	0,560017	valid
Y1.1	0,491395	0,709781	0,627757	valid
Y1.3	0,654545	0,701526	0,430118	valid
Y1.4	0,645012	0,852735	0,549299	valid
Y1.5	0,501550	0,799374	0,517646	valid
Y1.7	0,723914	0,867457	0,676208	valid
Y1.8	0,676020	0,690514	0,635532	valid
Y1.10	0,657073	0,783985	0,571569	valid
Y2.1	0,608695	0,579697	0,782379	valid
Y2.2	0,538746	0,622026	0,885950	valid
Y2.3	0,509358	0,596612	0,781061	valid
Y2.4	0,679176	0,570413	0,835929	valid
Y2.5	0,555776	0,596508	0,886931	valid
Y2.6	0,564454	0,648705	0,835730	valid
Y2.7	0,493883	0,608104	0,830108	valid
Y2.8	0,588062	0,644885	0,761281	valid
Y2.9	0,746079	0,662350	0,761281	valid
Y2.10	0,489828	0,547661	0,785556	valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Uji *Average Variance Extracted* (AVE) dilakukan untuk mengetahui nilai yang menunjukkan besarnya varian indikator yang terkandung dalam variabel. Nilai AVE variabel dinyatakan valid apabila nilai AVE berkisar di atas 0,50. Hasil uji *average variance extracted* masing-masing dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7.
Uji Average Variance Extracted

Variabel	AVE	Keterangan
Peran APIP	0,624786	Valid
Penerapan <i>Good Governance</i>	0,600858	Valid
Kinerja Pemerintah	0,668750	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Evaluasi model pengukuran berdasarkan *composite reability* digunakan untuk melihat reabilitas variabel. Variabel dapat dinyatakan reliabel jika memiliki nilai *composite reability* di atas 0,60 (Ghozali, 2014:43). Hasil uji *composite reability* masing-masing dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8.
Uji Composite Reability

Variabel	Composite Reability	Keterangan
Peran APIP	0,942709	Reliabel
Penerapan <i>Good Governance</i>	0,912721	Reliabel
Kinerja Pemerintah	0,952681	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Evaluasi *inner model* dilakukan dengan melihat nilai *R-square* (R^2) pada persamaan antar variabel endogen dengan cara menghitung nilai *predictive-relevance* (Q^2). Jika nilai Q^2 lebih besar dari 0 maka model dikatakan baik (Ghozali, 2014:42). Nilai *R-square* variabel laten endogen dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9.
Nilai R-Square

Variabel	R-square
Penerapan <i>Good Governance</i>	0,658162
Kinerja Pemerintah	0,591770

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan Tabel 9. berikut adalah perhitungan nilai *predictive-relevance* (Q^2).

$$\begin{aligned}
 Q^2 &= 1-(1-R_1^2)(1-R_2^2) \\
 &= 1-(1-0,658162)(1-0,591770) \\
 &= 1-(0,341838)(0,408230) \\
 &= 0,860451
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai Q^2 sebesar 0,860451 yang menunjukkan bahwa model memiliki *predictive-relevance* yang baik ($Q^2 = 0,860451 > 0$). Hal ini berarti 86% variasi pada variabel penerapan *Good Governancedan* kinerja pemerintah (variabel endogen) dijelaskan oleh variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t (*t-test*) pada setiap jalur pengaruh antar variabel. Hasil perhitungan jalur secara keseluruhan dapat dilihat pada koefisien jalur dan nilai signifikansi dalam pengujian hipotesis ditunjukkan oleh nilai *t-statistic* harus diatas 1,96 (Ghozali, 2014:67). Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10.
Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hubungan Antar Variabel	Koefisien Jalur	T-Statistik	Keterangan
H ₁	Peran APIP → Penerapan <i>Good Governance</i>	0,811272	32,201032	Diterima
H ₂	Peran APIP → Kinerja Pemerintah	0,315026	3,754657	Diterima
H ₃	Penerapan <i>Good Governance</i> → Kinerja Pemerintah	0,491319	4,874988	Diterima
H ₄	Peran APIP → Penerapan <i>Good Governance</i> → Kinerja Pemerintah	0,713619	15,295337	Diterima

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Hasil pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan teknik analisis data PLS pada Tabel 10 menunjukkan bahwa koefisien jalur pengaruh peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah terhadap penerapan *Good Governancemyaitu* sebesar 0,811272 dan *t-statistic* sebesar 32,201032. Berdasarkan hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap penerapan *Good*

Governance dapat diterima, dengan koefisien jalur yang signifikan, yaitu *t-statistic* (32,201032) lebih besar dari *t-tabel* (1,96). Hal ini mendeskripsikan bahwa peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah terhadap penerapan *Good Governance* oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar dengan koefisien jalur yang menunjukkan arah yang positif, artinya semakin tinggi persepsi pegawai negeri sipil yang bertugas di Pemerintah Daerah Kota Denpasar tentang efektifitas peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai auditor internal pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas internal serta konsultan manajemen pemerintahan, maka penerapan *Good Governance* di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Denpasar akan jauh lebih baik.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Amaliah (2014) yang menemukan bahwa auditor intern pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan kegiatan penjaminan kualitas dan *consulting* mampu meningkatkan penerapan *Good Governance* karena dalam kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance activity*) auditor internal melakukan audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu untuk mengawasi segala bentuk kegiatan operasional organisasi sektor publik untuk tidak menyimpang dari aturan-aturan hukum yang berlaku, serta penelitian Nofianti dan Suseno (2014) dan Adelia (2015) yang menyatakan peran auditor internal yang efektif dapat memberikan evaluasi yang independen terhadap laporan keuangan, informasi sistem operasi dan prosedur yang dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja. Lebih lanjut Kusmayadi (2012) serta Sari dan Raharja (2012) menyatakan bahwa audit internal merupakan salah satu elemen penting dalam

meningkatkan pengawasan internal, menilai akuntabilitas, optimalisasi mekanisme *check and balances*, serta melakukan fungsi kontrol dalam membantu manajemen mencapai tujuannya untuk mewujudkan *Good Governance*.

Hasil pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan teknik analisis data PLS pada Tabel 10 menunjukkan bahwa koefisien jalur pengaruh peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah terhadap kinerja pemerintah yaitu sebesar 0,315026 dan *t-statistic* sebesar 3,754657. Berdasarkan hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah dapat diterima, dengan koefisien jalur yang signifikan, yaitu *t-statistic* (3,754657) lebih besar dari *t-tabel* (1,96). Hasil tersebut mendeskripsikan bahwa peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah terhadap kinerja pemerintah yaitu Pemerintah Daerah Kota Denpasar dengan koefisien jalur yang menunjukkan arah yang positif, artinya semakin tinggi persepsi pegawai negeri sipil yang bertugas di Pemerintah Daerah Kota Denpasar tentang efektifitas peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai auditor internal pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas internal serta konsultan manajemen pemerintahan, maka semakin membaiknya kinerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Aikins (2011) Simangunsong (2014), dan Nedeia (2015) yang menemukan auditor intern pemerintah yang telah melakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan mempengaruhi efisiensi penggunaan anggaran dalam operasionalnya, yang berimplikasi pada kinerja organisasi yang membaik dengan efisiensi yang terjadi.

Auditor intern pemerintah merupakan alat yang efektif dibangun ke dalam struktur organisasi dan menjadi bagian inti dari organisasi tersebut, pengawasan terpadu yang dilakukan auditor intern pemerintah akan meningkatkan mutu dan insentif organisasi, menghindari biaya-biaya yang tidak diperlukan, dan memungkinkan tanggapan yang cepat terhadap kondisi yang berubah-ubah (Yusmalizar, 2014). Lebih lanjut Tusek dan Ivana (2016) menyatakan fungsi audit internal dalam pemerintahan merupakan faktor penting dalam mencapai pemerintahan yang efektif dan bersih, tindakan pengawasan intern dapat membantu organisasi mencapai target-targetnya, mencegah pemborosan sumber daya, membantu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan memastikan organisasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta terhindar dari aksi korupsi dalam organisasi.

Hasil pengujian hipotesis ketiga dengan menggunakan teknik analisis data PLS pada Tabel 10 menunjukkan bahwa koefisien jalur pengaruh penerapan *Good Governanc* terhadap kinerja pemerintah yaitu sebesar 0,491319 dan *t-statistic* sebesar 4,874988. Berdasarkan hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan penerapan *Good Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah dapat diterima, dengan koefisien jalur yang signifikan, yaitu *t-statistic* (4,874988) lebih besar dari *t-tabel* (1,96). Hasil tersebut mendeskripsikan bahwa penerapan *Good Governanc* terhadap kinerja pemerintah yaitu Pemerintah Daerah Kota Denpasar dengan koefisien jalur yang menunjukkan arah yang positif, artinya semakin tinggi penerapan *Good Governanc* yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar khususnya

oleh perangkat kerja daerah, maka semakin membaiknya kinerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar. Semakin baik dan konsistennya penerapan *Good Governancyang* dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar maka peningkatan kinerja pemerintah berdasarkan pengelolaan sumber daya yang ekonomis, efektif dan efisien akan tepat sasaran, sehingga pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien serta tepat sasaran merupakan cerminan kinerja yang membaik.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mulyawan (2009), Zeyn (2011), Acintya (2015), dan Widiari (2015) yang menyatakan *Good Governancediterapkan* bertujuan untuk pengelolaan organisasi agar lebih baik, sehingga sumber daya yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah dapat mencapai tujuannya yaitu untuk kemakmuran serta kemajuan masyarakat yang mencerminkan tercapainya kinerja pemerintah seperti yang diharapkan. Lebih lanjut Batubara (2006), Umar (2011), Nathmy *et al.* (2015), serta Alaaraj dan Hassan (2016) menyatakan para pembuat kebijakan di pemerintahan memiliki prioritas dalam membuat keputusan-keputusan untuk pengelolaan Negara yang lebih beretika terutama dalam mengurangi tindakan korupsi di pemerintahan dan membuat kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Hasil pengujian hipotesis keempat dengan menggunakan teknik analisis data PLS pada Tabel 10 menunjukkan bahwa koefisien jalur pengaruh peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah terhadap penerapan *Good Governancedan* implikasinya pada kinerja pemerintah yaitu sebesar 0,713619 dan *t-statistic*

sebesar 15,295337. Berdasarkan hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah berpengaruh positif simultan terhadap penerapan *Good Governancedan* penerapan *Good Governance* terhadap kinerja pemerintah dapat diterima, dengan koefisien jalur yang signifikan, yaitu *t-statistic* (15,295337) lebih besar dari *t-tabel* (1,96). Hal ini mendeskripsikan bahwa persepsi peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah terhadap penerapan *Good Governance* oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar dengan koefisien jalur yang menunjukkan arah yang positif, artinya semakin tinggi persepsi pegawai negeri sipil yang bertugas di Pemerintah Daerah Kota Denpasar tentang efektifitas peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai auditor internal pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas internal serta konsultan manajemen pemerintahan, maka penerapan *Good Governancedi* lingkungan Pemerintah Daerah Kota Denpasar akan jauh lebih baik, serta semakin tinggi penerapan *Good Governancenyang* dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar khususnya oleh perangkat kerja daerah, maka semakin membaiknya kinerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar.

Semakin efektif peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka semakin baik juga penerapan *Good Governancenyang* dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar sehingga berimplikasi pula pada kinerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar yang meningkat. Pelaksanaan kegiatan penjaminan (*assurance activity*) dan kegiatan konsultan (*consulting activity*) oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah terhadap Pemerintah Daerah Kota Denpasar, menjadikan penerapan *Good Governance* oleh

Pemerintah Daerah Kota Denpasar semakin efektif dengan optimalisasi penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* seperti daya tanggap terhadap permasalahan masyarakat Kota Denpasar, semakin tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, serta kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah Kota Denpasar berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, taat pada hukum yang berlaku, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Optimalisasi penerapan *Good Governance* oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar menjadikan kinerja pemerintah semakin membaik, peningkatan pelayanan publik, dan meningkatkan kepercayaan publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, serta mampu mengurangi tindakan-tindakan yang menyimpang seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nofianti dan Suseno (2014), Sadeli (2008), Sari (2015), serta Yusniyar, dkk (2016) yang menyatakan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif mampu meningkatkan penerapan *Good Governance* serta meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Lebih lanjut Pratolo (2010) menjelaskan bahwa peran dan tujuan pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai perwujudan amanah yang diembannya, indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat itu sendiri. Optimalisasi penerapan *Good Governance* serta efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan Aparat Pengawas Intern Pemerintah diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja

pemerintah, karena kinerja pemerintah yang optimal pada akhirnya dapat menciptakan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, karena kepuasan menjadi salah satu landasan kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi pemerintahan yang ada.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa model yang dibangun mempunyai daya prediktif yang relevan dan mampu menunjukkan secara komprehensif efektifitas peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai auditor intern pemerintah berpengaruh pada penerapan *Good Governancedilingkungan* Pemerintah Daerah Kota Denpasar dan implikasi atas penerapan *Good Governancemyang* dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar mampu memberikan sumbangsih peningkatan atas kinerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar itu sendiri.

Berdasarkan hasil dan pembahasan analisis pengolahan data, maka simpulan dalam penelitian yaitu penelitian ini membuktikan bahwa peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang efektif dengan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai auditor intern pemerintah berpengaruh dan menunjukkan arah yang positif terhadap penerapan *Good Governance*, penelitian ini menemukan bahwa peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang efektif dengan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai auditor intern pemerintah berpengaruh dan menunjukkan arah yang positif pada kinerja pemerintah, penelitian ini menemukan bahwa penerapan *Good Governancemyang* optimal berpengaruh dan menunjukkan arah positif pada kinerja pemerintah, penelitian ini menemukan bahwa peran Aparat Pengawas

Intern Pemerintah (APIP) yang efektif dengan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai auditor intern pemerintah berpengaruh dan menunjukkan arah yang positif terhadap penerapan *Good Governances* serta penerapan *Good Governance* berpengaruh dan menunjukkan arah positif pada kinerja pemerintah.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan pada simpulan penelitian adalah penelitian ini menekankan pada pengaruh konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat yang dapat diredam dengan penerapan *Good Governances* serta tindakan preventif yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri dengan melakukan pengawasan di intern pemerintah dengan melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk menunjang optimalisasi penerapan *Good Governance* oleh pemerintah. Kegiatan pengawasan tidak hanya perlu dilakukan oleh pemerintah sendiri sebagai langkah preventif melainkan unsur lainnya seperti dewan legislatif yang juga mempunyai legitimasi sebagai perwakilan masyarakat di pemerintahan untuk mengawasi pemerintah serta peran aktif masyarakat itu sendiri untuk ikut mengawasi penyelenggaraan pemerintah agar lebih bersih, beretika, serta berorientasi pada kepentingan publik. Disarankan dalam penelitian selanjutnya dapat melibatkan masyarakat sebagai responden dalam menilai bagaimana optimalisasi penerapan *Good Governances* dan kinerja pemerintah, dimana masyarakat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara sehingga segala dampak perumusan kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah dirasakan langsung oleh masyarakat.

REFERENSI

- Acintya, I Gusti Ayu Agung Diah. 2015. Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Dalam Implementasi SAKIP dan Penerapan Good Governance. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 12(2), h: 233-248.
- Aikins, K. S. 2011. An Examination of Government Internal Audits' Role in Improving Financial Performance. *Public Finance and Management*. Vol. 11(4), pp: 306-337.
- Aikins, K. S. 2012. Determinants of Auditee Adoption of Audit Recommendations: Local Government Auditors Perspective. *Journal of Budgeting, Accounting, and Financial Management*. pp: 195-220.
- Alaaraj, Hassan dan Sallahudin Hassan. 2016. Does Good Governance Mediate Relationship Between E-Government and Public Trust in Lebanon?. *International Review of Management and Marketing*. Vol. 6(3), pp: 500-509.
- Badruzaman, Jajang dan Irna Chairunnisa. 2011. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis AUDI*. 7(1), h: 57-70.
- Batubara, Alwi Hasyim. 2006. Konsep Good Governance Dalam Konsep Otonomi Daerah. *Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan*. Vol.3 (1), h: 1-6.
- Ebaid, I.E.S. 2011. Internal Audit Function: an Exploratory Study From Egyptian Listed Firms. *International Journal of Law and Management*. Vol. 53(2): 108-128.
- Eisenhardt, K.M. 1989. Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*. Vol. 14 (1): 57-74.
- Ghozali, Imam. 2014. *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Jensen, M. C. dan W. H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Vol. 3 (4), pp: 306-360.
- Jones, M. J. 2008. Internal Control, Accountability and Corporate Governance. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. Vol. 21 (7), pp: 1052-1075.
- Kusmayadi, Dedi. 2012. Determinasi Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Serta Implikasinya Pada Kinerja Bank. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 16(2), h: 147-156.
- Mihret, D. G., dan Woldeyohannis, G. Z. 2008. Value adding role of internal auditing. *Managerial Auditing Journal*. Vol. 23(6), pp: 567-595.
- Nathmy, E. I., S. F. Al-Aroud, dan T. H. Almbaidin. 2015. The Effect of The Absence of The Application of The Mechanisms of Corporate Governance on The Internal Auditing Efficiency to Reduce Financial Corruption in The Jordanian Ministries. *Advances in Management & Applied Economics*. Vol. 5(4), pp: 61-77.
- Nedea, Camelia Luciana. 2015. The Role and Prospects of The Internal Audit in Improving Management of Public Institutions. *Valahain Journal of Economic Studies*. Vol. 6(20), pp: 7-14.
- Novriansa, Agil dan Bambang Riyanto. 2016. Role Conflict and Role Ambiguity on Local Government Internal Auditors: The Determinant and Impacts. *Journal of Indonesian Economy and Business*. Vol.31 (1), pp: 63-82.
- Rasul, Sjahrudin. 2009. Penerapan Good Governance di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum Journal*, Vol.21 (3), h: 538-553.
- Sadeli, Dadang. 2008. Profesionalitas Aparat Pengawas Fungsional Intern Terhadap Pelaksanaan Audit Pemerintahan dan Implikasinya Kepada Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 10(2), h: 101-111.
- Sari, Eka Nurmala. 2015. Accounting Practices Effectiveness and Good Governance: Mediating Effects of Accounting Information Quality in

- Municipal Office of Medan City, Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting*. Vol. 6(2), pp: 1-10.
- Simangunsong, Rosma. 2014. The Impact of Internal Control Effectiveness and Internal Audit Role Toward The Performance of Local Government. *Research Journal of Finance and Accounting*. Vol. 5(7), pp: 50-58.
- Stoker, G. 1998. Governance As Theory: Five Propositions. *International Social Science Journal*. Vol. 50 (1), pp: 17-28.
- Tusek, Boris dan Barisic Ivana. 2016. Internal Audit Activities as a Support to Governance Processes. *International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship*. pp: 168-183.
- Umar, Haryono. 2011. Government Financial Management, Strategy for Preventing Corruption in Indonesia. *The South East Asian Journal of Management*. Vol. 5(1), pp: 19-35.
- Van Peurseem, K. 2004. Internal Auditors Role and Authority. *Managerial Auditing Journal*. Vol. 19(3), pp: 378 - 393.
- Wentzel, Kristin. 2002. The Influence of Fairness Perception and Goal Commitment on Managers Performance in a Budget Setting. *Behavior Research in Accounting*. Vol. 14, pp: 247-271.
- Yusmalizar. 2014. Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 2(3), h: 1-23.
- Yusniyar, Darwanis, dan Syukriy Abdullah. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern Terhadap Good Governance dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada SKPA Pemerintah Aceh). *Jurnal Magister Akuntansi*. Vol. 5(2), h: 100-115.
- Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 1(1), h: 21-37.